

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal/usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran tersebut, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di Kabupaten, maka sebuah desa diharuskan membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) sebagai tolok ukur keberhasilan yang dicapai oleh Pemerintah Desa dalam satu tahun.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) dimaksudkan agar kebijakan Pemerintah Desa Karanggedong menjadi lebih terarah dan runtut, sehingga semua yang dilakukan Pemerintah Desa Karanggedong bisa dilaporkan di akhir tahun kepada Bupati Temanggung melalui Camat Ngadirejo.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Karanggedong Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung Tahun 2021 ini merupakan bahan evaluasi dan tolok ukur dalam menentukan rencana kegiatan tindak lanjut bagi Desa Karanggedong khususnya dan bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung pada umumnya sebagai bahan kebijakan dalam menentukan program serta kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran berikutnya.

Dalam penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat di Desa Karanggedong baik di bidang pelayanan administrasi, pembangunan fisik, bidang pembinaan serta bidang pemberdayaan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dari disusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Periode 2021-2026 adalah untuk melaporkan apa yang menjadi penjabaran program kegiatan sebagaimana tercantum dalam RPJM Desa Karanggedong Tahun 2021-2026.

Sedangkan tujuan dari disusunnya laporan ini yaitu sebagai salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan Desa (Asas Akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek

yaitu hukum, administrasi maupun moral. Pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban pemerintah desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintah desa.

Pelaporan sebagai salah satu alat pengendalian untuk:

1. Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan
2. Mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, factor-faktor berpengaruh, keberhasilan, dan sebagainya) terkait pelaksanaan kegiatan pemerintah desa.

C. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang digunakan sebagai acuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 54);
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 54);
9. Peraturan Desa Karanggedong Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Karanggedong Tahun 2021-2026 (Lembaran Desa Karanggedong Tahun 2020 Nomor 7);
10. Peraturan Desa Karanggedong Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Karanggedong Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Karanggedong Tahun 2020 Nomor 8);
11. Peraturan Desa Karanggedong Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karanggedong Tahun Anggaran 2021;

12. Peraturan Desa Karanggedong Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karanggedong Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Karanggedong Kecamatan Ngadirejo Tahun 2021 Nomor 2) setelah sebelumnya diubah dengan Peraturan Desa Karanggedong Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karanggedong Tahun Anggaran 2021.

D. VISI MISI

Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang ingin diwujudkan. Sedangkan misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

Penyelenggaraan pemerintah Desa Karanggedong memiliki visi sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) sebagai berikut:

“Mewujudkan Desa Karanggedong yang agamis, berbudaya dan sejahtera dengan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih”

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Desa Karanggedong menetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas iman dan taqwa melalui pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama, kerukunan umat beragama dan fasilitasi kerukunan umat beragama;
2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan ketrampilan dan penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi dalam rangka pengembangan kualitas sumber daya manusia;
3. Mewujudkan peningkatan budaya sehat dan aksesibilitas kesehatan masyarakat;
4. Meningkatkan kemajuan dan kemandirian masyarakat untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan;
5. Mewujudkan peningkatan infrastruktur Desa Karanggedong;
6. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, tidak KKN dan berorientasi pada pelayanan public;
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan hasil budidaya pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

E. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam melaksanakan misi yang telah ditetapkan, Pemerintah Desa Karanggedong melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal desa untuk merumuskan strategi dan kebijakan.

1. Analisis Lingkungan Internal Desa

Kekuatan Desa Karanggedong meliputi

- a. Memiliki wilayah yang cukup luas,
- b. Memiliki kewenangan berdasarkan hak usul dan kewenangan local berskala desa,

- c. Berada di jalur lalu lintas antar kabupaten dan provinsi,
- d. Memiliki lahan pertanian yang cukup luas,
- e. Terjalannya hubungan yang sinergis antara pemerintah dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang ada,
- f. Memiliki sarana perkantoran dan olahraga yang representative,
- g. Gotong royong, swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan cukup besar,
- h. Adanya komitmen yang kuat dari pemerintah desa untuk melakukan perubahan.

Kelemahan Desa Karanggedong:

- a. Masih tingginya angka kemiskinan,
- b. Masih minimnya kemampuan perangkat desa,
- c. Terbatasnya kemampuan keuangan desa,
- d. Masih minimnya sarana dan prasarana desa,
- e. Belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa,
- f. Belum maksimalnya penerimaan pendapatan asli desa.

2. Analisis Lingkungan Eksternal Desa

Peluang bagi Desa Karanggedong:

- a. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan segala peraturan turunannya,
- b. Adanya Dana Desa dari APBN,
- c. Adanya peluang kersama dengan desa lain dan atau pihak ketiga,
- d. Adanya sinergisitas antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten.

Tantangan atau ancaman bagi Desa Karanggedong:

- a. Individualisme akibat dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mengikis semangat kegotongroyongan masyarakat desa,
- b. Banyaknya kepala desa/perangkat desa yang tersandung masalah hukum,
- c. System Keuangan Desa secara online.

3. Factor Penentu Keberhasilan

Kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan Desa Karanggedong adalah:

- a. Kemampuan dan kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa,
- b. Pengelolaan Keuangan Desa,
- c. Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat desa.

Dengan demikian, dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan desa maka strategi dan kebijakan yang ditempuh Pemerintah Desa Karanggedong adalah:

- a. Meningkatkan kapasitas SDM Kepala Desa dan Perangkat Desa,

- b. Menyelenggarakan pemerintahan yang peka terhadap permasalahan dan kebutuhan masyarakat,
- c. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat tanpa diskriminasi,
- d. Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Desa,
- e. Melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang transparan, tertib, disiplin anggaran dan akuntabel,
- f. Meningkatkan kapasitas SDM masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa,
- g. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana desa.

F. GAMBARAN UMUM DESA

Gambaran umum Desa Karanggedong meliputi kondisi geografi, kondisi demografi, kondisi social, kondisi ekonomi, kondisi pemerintahan desa, serta kondisi sarana dan prasarana desa.

1. Kondisi Geografi

Desa Karanggedong merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Ngadirejo yang berada pada ketinggian 871 mdpl dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Petirejo Kecamatan Ngadirejo
- b. Sebelah Timur : Desa Sukomarto Kecamatan Jumo
- c. Sebelah Selatan : Desa Traji Kecamatan Parakan
- d. Sebelah Barat : Desa Medari Kecamatan Ngadirejo

Luas wilayah Desa Karanggedong sebesar 177 ha dengan rincian terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 1.1
PENGGUNAAN TANAH

NO.	PENGGUNAAN	LUAS (Ha)
1.	Luas tanah pemukiman	13,7
2.	Luas tanah sawah	131
3.	Luast tanah kering/tegalan	19
4.	Lain-lain	13,3
	Total Luas	177

Secara administratif Desa Karanggedong terbagi menjadi 3 (tiga) dusun yang terbagi menjadi 3 (tiga) Rukun Warga (RW) dan 20 (dua puluh) Rukun Tangga (RT), sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 1.2
PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRATIF

NO	NAMA DUSUN	NAMA RW	JUMLAH RT
1.	Dusun Krajan I	RW 01	7
2.	Dusun Krajan II	RW 02	8

3.	Dusun Tloyo	RW 03	5
----	-------------	-------	---

2. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Desa Karanggedong pada akhir tahun 2021 adalah sebanyak 2.856 jiwa, yang terdiri dari:

- a. Penduduk laki-laki sebanyak 1.425 jiwa
- b. Penduduk perempuan sebanyak 1.431 jiwa

Sedangkan jumlah kepala keluarga di Desa Karanggedong sebanyak 961 KK.

Adapun jumlah penduduk menurut usia dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3

JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA

NO.	UMUR (TAHUN)	JUMLAH (JIWA)
1.	0 – 4 Tahun	195
2.	5 – 9 Tahun	237
3.	10 – 14 Tahun	192
4.	15 – 19 Tahun	218
5.	20 – 24 Tahun	229
6.	25 – 29 Tahun	235
7.	30 – 34 Tahun	222
8.	35 – 39 Tahun	205
9.	40 – 44 Tahun	189
10.	45 – 49 Tahun	192
11.	50 – 54 Tahun	189
12.	55 – 59 Tahun	186
13.	60 – 64 Tahun	124
14.	65 – 69 Tahun	103
15.	70 – 74 Tahun	45
16.	> 75 Tahun	95
	Jumlah	2.856

3. Kondisi Sosial

Kondisi sosial masyarakat Desa Karanggedong ditunjukkan masih rendahnya kualitas dari sebagian besar SDM masyarakat serta cenderung masih kuatnya budaya paternalistic. Meskipun demikian pola budaya seperti ini dapat dikembangkan sebagai kekuatan dalam pembangunan yang bersifat mobilitas masa. Disamping itu masyarakat Desa Karanggedong yang cenderung memiliki sifat ekspresif, agamis, dan terbuka dapat dimanfaatkan sebagai pendorong budaya transparansi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan. Munculnya masalah kemiskinan, ketenagakerjaan dan perburuhan menyangkut pendapatan, status pemanfaatan lahan pada fasilitas umum menunjukkan masih adanya kelemahan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang ada saat ini. Hal tersebut sebagai akibat dari tidak meratanya tingkat pendidikan yang diperoleh masyarakat.

Adapun tingkat pendidikan masyarakat Desa Karanggedong dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 1.4

JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH JIWA
1.	Tidak/Belum Sekolah	568
2.	Belum Tamat SD/ sederajat	327
3.	Tamat SD/ sederajat	1.048
4.	Tamat SLTP/ sederajat	439
5.	Tamat SLTA/ sederajat	362
6.	Diploma I/II	16
7.	Akademi/Diploma III / Sarjana Muda	24
8.	Diploma IV / Strata I	70
9.	Strata II	2
10.	Strata III	-
	Jumlah	2.856

Sedangkan sarana pendidikan formal cukup memadai dalam rangka meningkatkan kualitas peserta didik, pemerintah desa beserta warga masyarakat sedang melakukan peningkatan sarana pendidikan berupa rehabilitasi sarana pendidikan seperti terlihat dalam Tabel berikut.

Tabel 1.5

JUMLAH SARANA PENDIDIKAN

NO.	SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH (BUAH)
1.	Gedung SD dan MI	1
2.	Gedung TK dan RA	1
3.	TPA	2
4.	Gedung SMP/MTs	-
	Jumlah	4

Dilihat dari tingkat ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, penduduk Desa Karanggedong 94,13% beragama Islam dan 5,87% beragama Non Islam. Namun demikian perselisihan antar agama tidak pernah terjadi, walaupun kadang sesekali sesama pemeluk agama Islam muncul permasalahan kecil tentang keyakinan dan tata cara beribadah, tapi hal tersebut tidak

menimbulkan konflik antar warga. Adapun jumlah penduduk Desa Karanggedong berdasar agama/kepercayaan dan sarana ibadah tercantum pada Tabel 1.6.

Tabel 1.6

JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA/KEPERCAYAAN DAN TEMPAT IBADAH

NO.	AGAMA	JUMLAH (JIWA)
1.	Islam	2.693
2.	Kristen	66
3.	Katholik	88
4.	Budha	7
5.	Kepercayaan	0
6.	Hindu	0
7.	Konghucu	2
SARANA TEMPAT IBADAH		
1.	Masjid	4
2.	Mushola	5
3.	Vihara	0
4.	Gereja/Rumah Ibadah	1
5.	Pura	0

Disamping itu, Pemerintah Desa Karanggedong berupaya menyediakan sarana kesehatan agar kesejahteraan masyarakat terjamin. Adapun sarana kesehatan dan tingkat kesejahteraan dapat dilihat pada Tabel 1.7, Tabel 1.8, dan Tabel 1.9.

Tabel 1.7

SARANA KESEHATAN

NO.	SARANA KESEHATAN	JUMLAH
1.	Posyandu	4
2.	Bina Keluarga Balita	1
3.	Bina Keluarga Lansia	1
4.	Poliklinik Desa (PKD)	1
5.	Puskesmas	-

Tabel 1.8

SARANA TENAGA KESEHATAN

NO.	SARANA TENAGA KESEHATAN	JUMLAH (ORANG)
1.	Dokter	-
2.	Perawat	1

3.	Bidan Desa	1
4.	Dukun Bayi Terdidik	3

Tabel 1.9**JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT KESEJAHTERAAN**

NO.	TINGKAT KESEJAHTERAAN	JUMLAH (KK)
1.	Prasejahtera	638
2.	Sejahtera 1	164
3.	Sejahtera 2	89
4.	Sejahtera 3	50
5.	Sejahtera 3 plus	20
	Jumlah	961

Organisasi pemuda, olahraga, dan kesenian juga banyak terdapat di Desa Karanggedong. Adapun jenis dan jumlahnya dapat dilihat pada Tabel 1.10 berikut.

Tabel 1.10**ORGANISASI PEMUDA, OLAHRAGA, DAN KESENIAN**

NO.	JENIS ORGANISASI	JUMLAH (UNIT)
1.	Karang Taruna	-
2.	Kubro Siswo	-
3.	Rebana	2
4.	Sholawat Jawa	1
5.	Sepak Bola	2
6.	Bulu Tangkis	1
7.	Kuda Lumping	2
8.	Warokan	1
9.	Keroncong	1
10.	Angklung	1

4. Kondisi Ekonomi

Perekonomian Desa Karanggedong secara umum didominasi pada sector pertanian dan perdagangan yang system pengelolaannya masih semi tradisional serta penataan yang masih membutuhkan pengelolaan secara strategis supaya bias tertata baik dan mendapatkan hasil yang maksimal. Penjabaran kondisi ekonomi Desa Karanggedong ada pada Tabel 1.11 di bawah ini.

Tabel 1.11
JUMLAH PENDUDUK MENURUT PEKERJAAN

JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Belum/Tidak Bekerja	284	275
Mengurus Rumah Tangga	-	381
Pelajar/Mahasiswa	253	239
Pensiunan	14	10
PNS	13	19
TNI	2	-
Kepolisian RI	1	-
Perdagangan	9	12
Petani	118	84
Peternak	8	0
Transportasi	17	-
Karyawan Swasta	118	80
Karyawan BUMN	3	2
Karyawan BUMD	-	-
Karyawan Honorer	3	2
Buruh Harian Lepas	144	45
Buruh Tani	149	105
Buruh Peternakan	4	-
Pembantu Rumah Tangga	-	3
Tukang Cukur	1	-
Tukang Listrik	1	-
Tukang Batu	12	-
Tukang Kayu	16	-
Tukang Las	1	-
Tukang Jahit	1	1
Penata Rias	-	2
Mekanik	5	-
Seniman	3	2
Guru	8	24
Dokter	-	-
Bidan	-	2
Perawat	-	-
Apoteker	-	-

Pelaut	2	-
Sopir	30	1
Paranormal	1	-
Pedagang	56	80
Perangkat Desa	7	3
Kepala Desa	1	-
Wiraswasta	138	58
Jumlah Penduduk	1.425	1.431
Total	2.856	

Lembaga perekonomian yang terdapat di Desa Karanggedong dapat dilihat pada table 1.12 berikut:

Tabel 1.12

LEMBAGA PEREKONOMIAN

NO.	JENIS	JUMLAH (KELOMPOK/UNIT)
1.	Simpan Pinjam	42
2.	Kelompok Tani	4
3.	Gapoktan	1
4.	Kelompok Wanita Tani	2

Desa Karanggedong memiliki berbagai potensi di sector pertanian yaitu padi, tembakau, cabe, dan petani hortikultura. Jika potensi-potensi tersebut dapat dimaksimalkan, tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan para petani di Desa Karanggedong. Akan tetapi, dengan keterbatasan skill, pengetahuan, serta perhatian dari para ahli di bidang pertanian, sehingga potensi tersebut kurang bisa dimaksimalkan. Oleh sebab itu, pelatihan ketrampilan di bidang pertanian sangat dibutuhkan oleh para petani agar dapat menambah wawasan dalam memperjuangkan kepentingan sendiri dan secara mandiri. Adapaun luas lahan pertanian di Desa Karanggedong adalah 131 ha dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

Table 1.13

PENGUNAAN LAHAN PERTANIAN

NO.	JENIS PENGGUNAAN	LUAS
1.	Sawah Irigasi ½ Teknis	121 Ha
2.	Sawah Tadah Hujan	10 Ha
	Jumlah	131 Ha

Berdasarkan table diatas, dapat diketahui bahwa penggunaan lahan pertanian sawah irigasi ½ teknis adalah sebesar 92,4%, sedangkan penggunaan lahan pertanian berupa sawah tadah hujan adalah sebesar 6,6%.

Selain potensi di bidang pertanian, Desa Karanggedong juga mempunyai potensi besar di bidang perdagangan. Selain karena letaknya yang strategis, masyarakat Desa Karanggedong juga mempunyai berbagai macam ide dalam bidang perdagangan. Sehingga, Pemerintah Desa memberikan fasilitas berupa Kios dan pasar desa yang dapat disewa masyarakat untuk memaksimalkan potensi dagangnya.

5. Kondisi Pemerintah Desa

Kondisi pemerintahan Desa Karanggedong meliputi beberapa lembaga yang ada di dalamnya, yaitu pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta Lembaga Kemasyarakatan Desa.

a) Pemerintah Desa

Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Karanggedong ditetapkan dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2017, terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Desa, 1 (satu) orang Sekretaris Desa, 3 (tiga) orang Kepala Seksi, 3 (tiga) orang Kepala Urusan, serta 3 (tiga) orang Kepala Dusun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.14 Aparatur Pemerintah Desa Karanggedong.

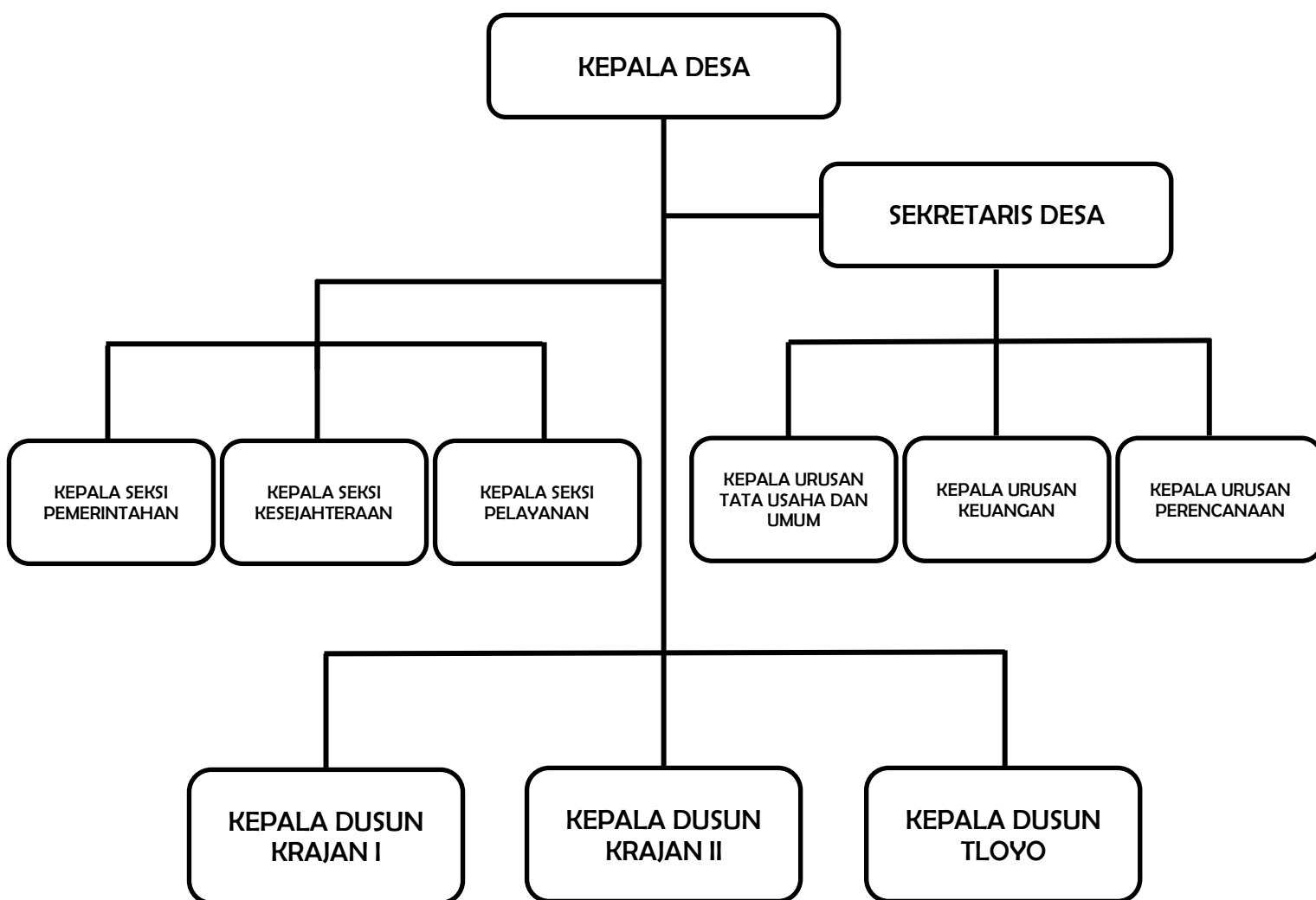
Tabel 1.14

APARATUR PEMERINTAH DESA KARANGGEDONG

NO.	NAMA	TTL	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN/ AGAMA	JABATAN
1.	Wahyu Widiyanta APSA, SS.	21-11-1975	Laki-laki	S1 / Islam	Kepala Desa
2.	Bondhan Rukmasari	27-07-1987	Laki-laki	S1 / Islam	Sekretaris Desa
3.	Rahayu Septi Ningrum	22-09-1993	Perempuan	S1 / Islam	Kepala Seksi Pemerintahan
4.	Mursalim	06-09-1982	Laki-laki	SLTA / Islam	Kepala Seksi Keejahteraan
5.	Gunari	03-04-1979	Laki-laki	SLTP / Islam	Kepala Seksi Pelayanan
6.	Siti Musidah	01-12-1973	Perempuan	SLTA / Islam	Kepala Urusan Keuangan
7.	Noni Ismawati	23-11-1993	Perempuan	SLTA / Islam	Kepala Urusan Perencanaan
8.	Fajar Adi Nugroho	03-06-1985	Laki-laki	S1 / Islam	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

9.	Tri Pitoro	06-09-1965	Laki-laki	SLTA / Islam	Kepala Dusun Krajan I
10.	Sujadi	02-01-1962	Laki-laki	SLTA / Islam	Kepala Dusun Krajan II
11.	Sabar Trimo	12-08-1981	Laki-laki	SLTA / Islam	Kepala Dusun Tloyo

**BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
KARANGGEDONG**



Gambar 1.1

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA KARANGGEDONG

b) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karanggedong berjumlah 7 orang yang keanggotaannya sebagai berikut:

Tabel 1.15
DAFTAR ANGGOTA BPD DESA KARANGGEDONG
PERIODE 2019-2025

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	ALAMAT
1.	Sugiarto	Laki-laki	Ketua	Krajan I
2.	Susilo	Laki-laki	Wakil Ketua	Cangkalan
3.	Bangun Wijayanto	Laki-laki	Sekretaris	Karang Pakel
4.	Muh Kamil	Laki-laki	Koordinator Bidang Pembangunan	Tloyo
5.	Eko Trimulyo	Laki-laki	Anggota	Tloyo
6.	Sam'ani	Laki-laki	Koordinator Bidang Pemerintahan	Margomulyo
7.	Vivin Nuviyanti	Perempuan	Anggota	Krajan II

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kewajiban:

- 1) Merumuskan peraturan desa bersama Kepala Desa;
- 2) Meminta pertanggungjawaban Kepala Desa atas penyelenggaraan pemerintah desa.

c) Lembaga Kemasyarakatan Desa

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa antara lain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), Karang Taruna, dan Satgas Linmas yang ditetapkan dengan peraturan desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

Lembaga Kemasyarakatan Desa Karanggedong sudah terbentuk tetapi belum ditetapkan dengan peraturan desa. Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa Karanggedong yaitu LPMD, PKK, 20 RT, 3 RW, dan Satgas Linmas dengan rincian keanggotaan sebagaimana table di bawah ini.

Tabel 1.16
DAFTAR PENGURUS LPMD PERIODE 2019-2021

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Ketua Umum	Muh Soleh
2.	Ketua II	Nasrodin
3.	Sekretaris	Adi Prasetyo
4.	Bendahara	Edi Sasongko

5.	Seksi Agama	Edi Pitoyo
6.	Seksi Kamtramtib	Tajudin
7.	Seksi Pemuda dan Olahraga	Wateman
8.	Seksi Perekonomian Kop dan Ling. Hidup	Guntur Suhardiman
9.	Seksi Kesehatan, KB, dan Kesejahteraan	Sutriyono

Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
- 2) Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
- 3) Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan;
- 4) Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat.

Table 1.17

DAFTAR PENGURUS TP-PKK PERIODE 2019-2025

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	Ny. Qosidah
2.	Sekretaris I	Eva Dian Sofiyanti
3.	Sekretaris II	Asmiyati
4.	Bendahara	Hj. Siti Latifah
5.	Wakil Bendahara	Nurita Fatmiyati
6.	POKJA I: Ketua Sekretaris Anggota	Sumarti Noni Ismawati Sri Firnani Siti As'adah Umi Uswatun Mariyam Asti Rahayu Septi Ningrum Amin Aina
7.	POKJA II: Ketua Sekretaris Anggota	Ani Pujiwati Vivin Nuviyanti Endang Sri Sukaenti Sukamti Sri Tunariyah
8.	POKJA III: Ketua	Kusmiyatun

	Sekretaris Anggota	Sugiyah Tri Murdiyati Rahayu Mudrikah Walti Triyanti Titik Sunarti Sunarti Noni Ismawati
9.	POKJA IV: Ketua Sekretaris Anggota	Tumiyati Rusmawati Partinah Yumiyati Heni Riyanti Umiyanah Yuniatun Siti Musidah

Tugas TP-PKK Desa/Kelurahan meliputi:

- 1) Membina dan memberdayakan masyarakat menuju keluarga sejahtera;
- 2) Melaksanakan 10 (sepuluh) program pokok PKK;
- 3) Membina dan menggerakkan kelompok PKK RW, RT, dan Dasa Wisma;
- 4) Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- 5) Berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa.

Tabel 1.18

DAFTAR KETUA RW DAN KETUA RT

NO.	NAMA	TGL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN	KET.
1.	Ruwadi	14-02-1972	SD/Sederajat	Ketua RW 01	
2.	Birun Achmad Ikhsan	08/10/1974	SD/Sederajat	Ketua RT 01	
3.	Wateman	08/04/1969	SD/Sederajat	Ketua RT 02	
4.	Sujarwan	31/12/1961	SD/Sederajat	Ketua RT 03	
5.	Sudardi	31/12/1964	SD/Sederajat	Ketua RT 04	
6.	Pardi Wiyoto	10/10/1974	SD/Sederajat	Ketua RT 05	

7.	Sumarno	30/11/1952	SD/Sederajat	Ketua RT 06	
8.	Untung Wiryo	31/12/1963	SD/Sederajat	Ketua RT 07	
9.	H. Nasrodin	05/04/1956	S1/Sederajat	Ketua RW 02	
10.	Muyadi	10/04/1973	SD/Sederajat	Ketua RT 01	
11.	Karyono	25/11/1969	SD/Sederajat	Ketua RT 02	
12.	Yutamto	10/08/1983	SD/Sederajat	Ketua RT 03	
13.	Ruwiyanto	31/10/1979	SD/Sederajat	Ketua RT 04	
14.	Mujiyadi	25/09/1965	SD/Sederajat	Ketua RT 05	
15.	Suyono	01/04/1980	SD/Sederajat	Ketua RT 06	
16.	Sarwanto	31/12/1965	SD/Sederajat	Ketua RT 07	
17.	Mujiyat	10/12/1982	SD/Sederajat	Ketua RT 08	
18.	Obet Anahdi	31/12/1969	SD/Sederajat	Ketua RW 03	
19.	Slamet Suyanto	04/05/1972	SD/Sederajat	Ketua RT 01	
20.	Nur Iksan	17/07/1973	SD/Sederajat	Ketua RT 02	
21.	Ribut Waryadi	16/02/1974	SD/Sederajat	Ketua RT 03	
22.	Munawar	31/12/1955	SD/Sederajat	Ketua RT 04	
23.	Sarsono	26/06/1967	SD/Sederajat	Ketua RT 05	

Tugas Ketua RW dan Ketua RT yaitu:

- 1) Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Membantu penyelenggaraan tugas pemerintah Desa/Kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kerjanya;
- 3) Menggerakkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan;
- 4) Membantu pemerintah desa/kelurahan dalam kebersihan dan penataan lingkungan;
- 5) Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban umum;
- 6) Menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dan antar anggota masyarakat dengan pemerintah desa/kelurahan;
- 7) Menumbuhkembangkan kehidupan gotong royong dan social kemasyarakatan;
- 8) Melaksanakan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Tabel 1.19

DAFTAR PENGURUS SATGAS LINMAS

NO.	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KET
1.	Susanto	Danton	Mekarsari	
2.	Karyono	Sekretaris	Krajan II	

3.	Aniel Risaldo	Anggota	Tloyo	
4.	M. Irfan Hafidzullah	Anggota	Tloyo	
5.	Budi Mulyono	Anggota	Sidodadi	
6.	Jumali	Anggota	Sidodadi	
7.	Karyadi	Anggota	Krajan II	
8.	Ruwadi	Anggota	Depok	
9.	Waluyo	Anggota	Krajan II	
10.	Suparno	Anggota	Sidodadi	
11.	Waldiyono	Anggota	Tloyo	
12.	Waldiyono	Anggota	Krajan II	
13.	Suyadi	Anggota	Margomulyo	
14.	Sutrisno	Anggota	Tloyo	
15.	Siroji	Anggota	Sambungsari	
16.	Sunaryo	Anggota	Cangkalan	
17.	Mutarman	Anggota	Cangkalan	
18.	Parsidi	Anggota	Sidodadi	
19.	Sulistyo	Anggota	Karangsari	
20.	Munif Al Maskur	Anggota	Sidodadi	
21.	Ngadiyono	Anggota	Depok	
22.	Sukiman	Anggota	Panjangsari	
23.	Mulyanto	Anggota	Panjangsari	
24.	Feri	Anggota	Cangkalan	
25.	Sarwidi	Anggota	Sidodadi	

Satgas Linmas mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, membantu aparat pemerintah dalam memelihara keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, membantu kegiatan social kemasyarakatan serta membantu pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan pemilihan kepala desa.

6. Kondisi Sarana dan Prasarana Desa

Moerir menyatakan bahwa pengertian sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek).

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pemerintah desa Karanggedong ada pada tabel 1.20 berikut ini.

Tabel 1.20
SARANA DAN PRASARANA

NO.	SARANA PRASARANA	JUMLAH
1.	Kantor Desa	1 unit
2.	Balai Desa	1 unit
3.	Almari kantor/arsip	6 buah
4.	Meja dan kursi kantor	13 unit
5.	Meja kursi tamu	7 unit
6.	Kursi rapat	100 buah
7.	Kantor PKK	1 unit
8.	Gedung PKD	1 unit
9.	Gedung PAUD	1 unit
10.	Lapangan Desa	1 unit
11.	Laptop	8 buah
12.	Komputer	0 buah
13.	Mesin Ketik	1 buah
14.	Telepon	1 buah
15.	Kamera digital	1 buah
16.	Sound system	3 buah
17.	Printer	2 buah
18.	TV	1 buah
19.	Proyektor	1 buah
20.	Layar proyektor	1 buah
21.	Kompor gas	1 buah
22.	Tabung gas	1 buah
23.	Gedung Peralatan PNPM	1 buah

Kondisi Bangunan Kantor Desa

- 1) Status kepemilikan : milik desa
- 2) Luas tanah : 1.500 m²
- 3) Luas bangunan : 1.123 m²
- 4) Kondisi bangunan : baik

BAB II

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

NO.	URAIAN	APBDES (Rp)	REALISASI (Rp)
1	2	3	4
	BELANJA DESA		
A	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		
1	Penyelenggaraan Siltap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintah Desa		
	Penghasilan Tetap Kepala Desa	34.320.000	34.320.000
	Tunjangan Kepala Desa	7.200.000	7.200.000
	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	248.796.000	248.796.000
	Tunjangan Perangkat Desa	26.700.000	26.700.000
	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	185.328	0
	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	1.343.496	0
	Belanja ATK	2.567.326	2.558.000
	Perlengkapan Listrik	500.000	500.000
	Perlengkapan Alat Rumah Tangga	700.000	696.000
	Belanja BBM	250.000	240.000
	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	3.200.000	2.527.650
	Belanja Barang Konsumsi	14.700.000	9.602.500
	Belanja Jasa Honorarium Petugas	10.800.000	10.800.000
	Belanja Honorarium PKPKD & PPKD	12.400.000	12.400.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.000.000	3.885.000
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota	3.000.000	2.950.000
	Belanja Jasa Langganan Listrik	6.458.369	5.730.195
	Belanja Jasa Langganan Air Bersih	2.300.000	2.299.750
	Belanja Jasa Langganan Internet	5.200.000	5.103.621
	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	-	1.920.023
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	1.576.200	1.573.000
	Belanja Pemeliharaan Peralatan	500.000	330.000
	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	500.000	230.000
	Belanja Modal Peralatan Komputer	500.000	405.000
	Tunjangan BPD	23.400.000	23.400.000
	Operasional BPD	2.000.000	2.000.000
	Operasional RT/RW	2.800.000	2.800.000
	Insentif RT/RW	33.120.000	33.120.000
	Tunjangan Bngkok Kepala Desa	51.000.000	51.000.000
	Tunjangan Bngkok Perangkat Desa	162.000.000	162.000.000
2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa		
	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3.200.000	3.108.000
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3.155.000	0
3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan		
	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.150.000	1.748.500
	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	35.201.200	34.553.700
	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif	8.950.000	3.923.000
4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan		
	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler)	5.250.000	0
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes)	15.479.000	8.672.500
	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ)	16.000.000	10.641.400
	Pengembangan Sistem Informasi Desa	18.068.460	18.068.460
	Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Wilayah & BPD	19.300.000	0
5	Sub Bidang Pertanahan		
	Sertifikasi Tanah Kas Desa	2.000.000	0
	Administrasi PBB	1.000.000	178.500

	Jumlah	791.770.379	733.180.339
B	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		
1	Sub Bidang Pendidikan		
	Penyelenggaraan PAUD	48.800.000	44.453.500
	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	17.850.000	12.003.000
2	Sub Bidang Kesehatan		
	Penyelenggaraan Posyandu	20.600.000	19.525.000
	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan)	22.600.000	21.884.000
	Fasilitasi Forum Kesehatan Desa/Kader Kesehatan	9.250.000	7.620.000
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	Pembangunan Jalan Desa (Aspalisasi dan Pavingisasi)	257.360.000	251.161.000
	Pembangunan Jalan Usaha Tani	91.072.000	91.072.000
	Pembangunan Gorong-gorong	40.218.000	40.218.000
	Pavingisasi Halaman Balai Desa	50.000.000	50.000.000
4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman		
	Dukungan Pelaksanaan Program RTLH	113.750.000	13.372.000
	Pemeliharaan SPAL Krajan Kidul	10.000.000	9.926.500
	Pembangunan Jambanisasi	13.750.000	13.662.000
	Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah	180.250.000	170.436.000
5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
	Pemanfaatan Lahan Pekarangan	22.450.000	20.550.000
	Reboisasi dan Penanaman Turus Jalan	17.650.000	16.188.000
6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa		
	Pengadaan Alat Komunikasi	3.200.000	2.950.000
	Jumlah	978.925.000	804.227.400
C	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		
1	Sub Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum		
	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan oleh Pemdes	3.073.907	1.706.000
	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	27.116.000	9.790.000
2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		
	Penyelenggaraan Festival Kesenian (HUT RI)	750.000	0
3	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		
	Pembinaan PKK	7.150.000	6.411.800
	Pembinaan KPMD	5.000.000	5.000.000
	Jumlah	123.089.907	102.907.800
D	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
1	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan	10.900.000	9.758.000
2	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		
	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	19.000.000	11.374.000
	Jumlah	29.900.000	21.132.000
E	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT		
1	Sub Bidang Keadaan Darurat	0	0
2	Sub Bidang Keadaan Mendesak	129.500.000	88.800.000
	Jumlah	129.500.000	88.800.000
	Total Jumlah Belanja	2.053.185.286	1.750.247.539

A. Kebijakan Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa, pemerintah desa Karanggedong mengacu pada aturan-aturan yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Karanggedong Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah dirubah Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karanggedong Tahun Anggaran 2021.

2. Peraturan Desa Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

Peraturan Desa Karanggedong Nomor 2 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

B. Keberhasilan Permasalahan Dan Solusi

NO	BIDANG	KEBERHASILAN YANG DICAPAI	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	SOLUSI/ UPAYA YANG DITEMPUH
1	BIDANG PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA	1. Pengelolaan dan penatausahaan administrasi Desa 2. Penataan rencana pembangunan Desa 3. Peningkatan Pelayanan di Kantor Desa	1. Kurangnya Skill (Pengetahuan) Aparat Desa 2. Minimnya kesadaran Masyarakat dalam Pembayaran PBB 3. Kesulitan dalam Pendataan penduduk yang falid 4. Kondisi bangunan Kantor Desa yang kurang memadai karena minimnya PAD dan Bantuan dari APBD Kabupaten	1. Membutuhkan pembinaan secara berkelanjutan 2. Pentingnya sosialisasi dalam pembayaran PBB 3. Perlu adanya tenaga khusus yang menangani masalah pendataan penduduk 4. Perlu adanya bantuan dari Pemerintah untuk kegiatan Prmbangunan Kantor Desa.

2.	<p>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya sarana dan prasarana desa yang dapat mendukung perekonomian warga 2. Tersedianya peralatan pembakaran sampah untuk permasalahan sampah di Desa Karanggedong 3. Terwujudnya rumah dan jamban yang lebih layak untuk warga kurang mampu 4. Tersedianya air untuk irigasi sawah 5. Tersedianya penerangan jalan desa 6. Terealisasinya kegiatan posyandu balita dan lansia (sebelum ada pandemi) 7. Terealisasinya kegiatan belajar mengajar di PAUD binaan desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Pelaksana Kegiatan belum maksimal dalam menjalankan tugas, dikarenakan ada panitia yang tidak aktif 2. Kurang Terjalin Komunikasi/sosialisasi dengan Masyarakat 4. Kurang maksimal pengetahuan dan kepedulian Kader Kesehatan. 5. Tenaga pendidik kurang variatif dalam memberikan bahan ajar kepada peserta didik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjuk anggota TPK yang benar-benar kompeten dalam bidangnya 2. Perlu lebih di optimalkan lagi Musdus. 3. Peningkatan Kapasitas dan Sosialisasi Kader Kesehatan 5. Perlunya kegiatan pengembangan potensi tenaga pendidik
3.	<p>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terealisasinya kegiatan PKK 2. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa 3. Terwujudnya kegiatan belajar mengajar di TPQ 4. Pembinaan Aparat Keamanan Desa (LINMAS) 5. Perayaan hari besar Nasional. 6. Terlaksananya kegiatan Forum Kesehatan Desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya pengetahuan kader tentang tugas-tugas dalam pokja 2. Kurangnya kontribusi KPMD dalam pembangunan desa 3. Kurang sadarnya masyarakat tentang pentingnya belajar agama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu adanya pembinaan tentang tugas pokok anggota PKK sehingga dapat memberikan kontribusi dalam masyarakat 2. Peningkatan komunikasi antara pemdes dengan KPMD 3. Pendekatan masif terhadap masyarakat
4	<p>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa 2. Pemeliharaan pasar kuliner desa dengan mengadakan sarana prasarana yang lebih memadai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga sarana prasarana yang telah disediakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan edukasi kepada masyarakat

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Mengacu pada Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, pada pasal 3 poin 1 *“Laporan penyelenggaraan pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/walikota melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran”*.

Laporan dan Pertanggungjawaban adalah babakan terakhir dalam siklus Pengelolaan Keuangan Desa. Maka kami menyampaikan hal-hal pokok simpulan sebagaimana terurai dalam laporan ini :

1. Dasar Hukum Pelaporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun
2. Tahapan perencanaan yang merujuk pada RKP Desa Karanggedong
3. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Program kegiatan Desa Karanggedong tahun anggaran 2021 berdasarkan APB Desa.
4. Capaian keberhasilan, masalah dan penyelesaian masalah yang terjadi di Desa Karanggedong.

B. UCAPAN TERIMA KASIH

Tak lupa kami sampaikan banyak terimakasih kepada unsur yang terlibat membantu dalam penyelesaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Karanggedong Akhir Tahun Anggaran 2021. Baik dari Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Staf Desa Karanggedong dan terkhusus kepada Pendamping Lokal Desa Karanggedong.

C. SARAN

Saran untuk Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, serta Pemerintah Desa.

1. Seiring dengan keinginan pemerintah dalam hal ini Menteri Desa dan menteri keuangan, menginginkan Desa cermat dan cepat dalam penyerapan Anggaran. Oleh karena itu kami menyarankan agar pemerintah kabupaten tidak lambat dalam hal penetapan pagu anggaran, agar Desa bisa cepat menyelesaikan perancangan pembangunan untuk tahun berikutnya.
2. Dalam penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin, terkait dengan proses Penyelenggaraan Pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat di Desa Karanggedong Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung pada tahun 2021, baik di bidang pelayanan

administrasi, pembangunan fisik maupun bidang pembangunan non fisik. Namun demikian Pada tahun ini program perencanaan kami tidak terealisasi 100%, itu disebabkan adanya keterlambatan pencairan dan kurang mampunya tim pelaksana kegiatan.

3. Kamipun menyadari bahwa pada prakteknya dalam proses pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan target yang ditentukan dalam RPJM Desa dan RKP Desa, kami banyak menghadapi kendala, sehingga hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan kami yang masih banyak membutuhkan arahan bimbingan serta pembinaan dari pihak terkait.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2021 ini dibuat sebagai bahan evaluasi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Karanggedong, Januari 2022

Kepala Desa Karanggedong

(WAHYU WIDIYANTA APSA, SS)

Lampiran

Rincian Kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
1.	Peraturan Perundang-undangan.	a. Peraturan Desa	5
		b. Peraturan Bersama Kepala Desa	-
		c. Peraturan Kepala Desa	7
		d. Keputusan Kepala Desa	40
2.	Kependudukan.	a. Jumlah Penduduk:	
		1) Laki-laki	1.425
		2) Perempuan	1.431
		3) Jumlah Kepala Keluarga	961
		4) Jumlah Anggota Keluarga	1.895
		5) Jumlah Jiwa	2.856
		b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan:	
		1) Pendidikan Umum	2.856
		2) Pendidikan Khusus	-
		c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian:	
		1) PNS	32
		2) TNI	2
3) Swasta	198		
4) Lainnya	2.624		
3.	Pertanahan.	a. Status Tanah:	
		1) Sertifikat Hak Milik	443
		2) Sertifikat Hak Guna Usaha	1
		3) Sertifikat Hak Pakai	-
		b. Luas Tanah:	
		1) Bersertifikat	86
		2) Belum Bersertifikat	73,5
		3) Tanah Kas Desa	17,5
		c. Peruntukan:	
		1) Jalan	5 km
		2) Tanah Ladang	138 ha
		3) Bangunan Umum	3 ha
4) Perumahan	12,5 ha		
5) Ruang Fasilitas Umum	-		
d. Tanah yang Belum Dikelola			
1) Hutan	-		
2) Rawa-rawa	-		
4.	Manajemen Pemerintahan.	a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa	
		1) PNS	-
		2) Non PNS	11
		b. Jumlah Anggota BPD	7
		c. Musyawarah Desa	4
		d. Musrengbangdes	1
e. Musyawarah BPD	10		
5.	Ketentraman dan Ketertiban.	a. Pembinaan Hansip:	
		1) Jumlah Anggota	29
		2) Alat Pemadam kebakaran	-
		3) Jumlah Hansip Terlatih	15

		b. Ketentraman dan Ketertiban:	
		1) Jumlah Kejadian kriminal	5
		2) Jumlah Bencana Alam	-
		3) Jumlah Operasi Penertiban	-
		4) Jumlah Pos Keamanan	3
		5) Jumlah Kecelakaan Remaja	2
6.	Pembinaan lembaga Kemasyarakatan.	a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan:	
		1) Rt/Rw – Ada/Tidak	Ada
		2) PKK – Ada/Tidak	Ada
		3) Karang Taruna – Ada/Tidak	Tidak
		4) Pos Pelayanan Terpadu – Ada/Tidak	Ada
		5) LPM – Ada/Tidak	Ada
		b. Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat - Ya/Tidak	Ya
		c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa - Ya/Tidak	Ya
		d. Lembaga Kemasyarakatan diikuti sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak	Ya
		e. Lembaga Adat – Ada Tidak	Tidak
		f. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan – Ya/Tidak	-

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak
1	2	3	4
1.	Sarana dan Prasarana	a. Jalan Desa (Km)	0,7 km
		b. Jalan Kabupaten/Kota (Km)	-
		c. Jalan Provinsi (Km)	-
		d. Jalan Negara (Km)	-
		e. Jembatan (Buah)	2
		f. Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak)	Ada
2.	Pembangunan Pendidikan	Tempat Pendidikan. Pendidikan Umum	
		1). Kelompok Bermain (Jumlah)	1
		2). Taman Kanak-Kanak (Jumlah)	1
		3). Sekolah Dasar (Jumlah)	1
		4). Sekolah Menengah (Jumlah)	-
		5). Akademi (Jumlah)	-
		6). Institut/Sekolah Tinggi (Jumlah)	-
		Tempat Pendidikan Khusus	
		1). Pendidikan Pesantren (Jumlah)	-
		2). Madrasah (Jumlah)	-
		3). Sekolah Luar Biasa (Jumlah)	-
		4). Balai Latihan Kerja (Jumlah)	-
		5). Kursus-Kursus (Jumlah)	-

3.	Pembangunan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Rumah Sakit Umum Pemerintah (Jumlah) b. Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah) c. Rumah Sakit Kusta (Jumlah) d. Rumah sakit Mata (Jumlah) e. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah) f. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah) g. Rumah Bidan (Jumlah) h. Puskesmas (Jumlah) i. Apotik (Jumlah) 	- - - - - - - - -
4.	Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan	Sarana Olahraga: 1). Lapangan Umum (Jumlah) 2). Lapangan Khusus (Jumlah) Sarana Kesenian/Kebudayaan: 1). Gelanggang Remaja (Jumlah) 2). Gedung Kesenian (Jumlah) 3). Gedung Teater (Jumlah) 4). Gedung Bioskop (Jumlah) Sarana Sosial: 1). Panti Asuhan (Jumlah) 2). Panti Pijat Tunanerta (Jumlah) 3). Panti Wordo (Jumlah) 4). Panti Jompo (Jumlah) Sarana Komunikasi: 1). Radio Komunitas (Jumlah) 2). Papan Pengumuman (Jumlah)	1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
5.	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan (Jumlah) b. Industri Besar (Jumlah) c. Industri Sedang (Jumlah) d. Industri Rumah Tangga (Jumlah) e. Tempat Rekreasi (Jumlah) f. Hotel (Jumlah) g. Restoran/Rumah Makan (Jumlah) h. Saluran Irigasi (Jumlah) 	2 - 1 7 1 - - 5

3. Bidang Kemasyarakatan

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak
1	2	3	4
1.	Sosialisasi Produk Hukum Desa	a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa: 1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Berapa Kali) 2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Berapa Kali) 3) Peraturan Menteri mengenai Desa (Berapa Kali)	2 2 2
		b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah 1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa (Berapa Kali)	2

		2) Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota Tentang Desa (Berapa Kali)	2
		c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa	
		1) Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa kali)	5
		2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa	-
		3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa (Berapa Kali)	-
2.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali)	2
		b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa (Ada/Tidak)	Ada
		c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil (Ya/Tidak)	Ya
		d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban (Ya/Tidak)	Ya
		e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa (Ya/Tidak)	Ya
3.	Sosial Budaya Masyarakat	a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama (Berapa Kali)	3
		b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian (Berapa Kali)	2
		c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat (Berapa kali)	2
		d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup (Beberapa kali)	2
		e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal (Berapa Kali)	1
		f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan (Berapa Kali)	-
4.	Sosial Keagamaan	a. Majelis Taklim (Jumlah)	3
		b. Majelis gereja (Jumlah)	1
		c. Majelis Budha (Jumlah)	-
		d. Majelis Hindu (Jumlah)	-
		e. Remaja Masjid (Jumlah)	2
		f. Remaja Gereja (jumlah)	1
		g. Remaja Budha (Jumlah)	-
		h. Remaja Hindu (Jumlah)	-
5.	Ketenagakerjaan	a. Penyalur pembantu rumah tangga (Jumlah)	-
		b. Penampung Pekerja ke luar negeri (Jumlah)	-

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak
1	2	3	4
1.	Sosialisasi dan motivasi masyarakat	a. Bidang Sosial Budaya (Berapa Kali)	2
		b. Bidang Ekonomi (Berapa Kali)	1
		c. Bidang Politik (Berapa Kali)	3
		d. Bidang lingkungan hidup (Berapa Kali)	1
2.	Pemberdayaan Masyarakat	a. Pemberdayaan Keluarga (Berapa Kali)	4
		b. Pemberdayaan Pemuda (Berapa Kali)	1

		c. Pemberdayaan Olah raga (Berapa Kali)	2
		d. Pemberdayaan Karang taruna (Berapa Kali)	-
3.	Penggalangan Partisipasi Masyarakat	a. Bidang Pendidikan (Berapa Kali)	1
		b. Bidang Kesehatan (Berapa Kali)	2

Karanggedong, Januari 2022

Kepala Desa Karanggedong

(WAHYU WIDIYANTA APSA, SS)